

# Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kota Palembang

## Oleh

Muhammad Fahmi  
Dosen PNS Kopertis Wilayah II Palembang (Prodi Akuntansi  
Fakultas FEB UMP)  
[fahmsulai@yahoo.com](mailto:fahmsulai@yahoo.com) Telp/HP: 0813-6750-5600

## Info Artikel :

Diterima 16 Sept 2016  
Direview 30 Sept 2016  
Disetujui 21 Nov 2016

## ABSTRACT

*Budgetary policy education is run in local government in the city of Palembang. This research is to find out the problems arising from the policies made and to identify weaknesses, so that the impact of the budget allocation for the quality of education in the city of Palembang will run well and achieve the goals that have been set to implement and improve the quality of education in particular association as it normative documents listed on regional planning for the necessary implementation of a policy that allows nine years of basic education (9-year compulsory basic education) in Palembang can run well and quality.*

*This study used a qualitative approach to policy analysis method or methods of post policy analysis, while the technique of data collecting documentation study, interview and observation. Results and conclusions of the study show that the city of Palembang is already running a local autonomy in education well with 51.8% of the total education spending APBDnya.*

*The amount of the allocation of indirect spending compared to spending langsung. Ada realization of direct expenditure budget allocation that is less effective and efficient. Impact of Policy Implementation in 2012 Education Budget Allocation Budget allocation priority on basic education in Palembang with the goal of Increasing the quality of public education and increasing the number of qualified teachers S1 / D-IV.*

**Keywords**      *Education Budget, Finance Capabilities Regional, Shopping Direct*

## PENDAHULUAN

Kebijakan desentralisasi pendidikan dalam kerangka otonomi daerah menuntut tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan pendidikan. Hambatan di bidang pendidikan dari dulu hingga era otonomi belum bergeser. Persoalan pendidikan di daerah masih sekitar sarana dan prasarana yang tidak lengkap, jumlah dan mutu tenaga pengajar yang kurang dengan ketersebaran yang tidak merata. Akibatnya, kegiatan belajar-mengajar yang mengarah pada upaya perbaikan hasil belajar sulit terwujud.

Banyak pihak menilai pelayanan pendidikan di era otonomi daerah tidak menunjukkan perubahan berarti, bahkan cenderung memburuk. Permasalahan ini antara lain disebabkan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan desentralisasi pendidikan, sehingga menjadi kendala pencapaian berbagai sasaran program yang telah ditetapkan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan pendidikan dasar (Semeru, 2004). Desentralisasi pendidikan sebenarnya dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana kepedulian serta komitmen pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap dunia

pendidikan di wilayahnya. Apabila pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) belum mampu memberikan porsi yang memadai bagi sektor pendidikan, bagaimana halnya dengan daerah, apakah sektor pendidikan menjadi lebih baik atau sebaliknya. Hal ini hanya dapat terjawab oleh kebijakan pemerintah daerah itu sendiri.

Pentingnya sektor pendidikan dalam pembangunan manusia Indonesia sangat disadari oleh pemerintah pusat, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menginstruksikan bahwa nilai anggaran pembangunan setor pendidikan minimal sebesar 20 persen dari total APBN/APBD. Tampaknya euforia desentralisasi pendidikan belum menunjukkan kenyataan. Peran pendidikan dalam pembangunan sangat penting dalam rangka upaya penyiapan sumber daya manusia yang berkualitas, mampu berkompetisi dalam tatanan kehidupan global serta menghadapi persaingan di masa depan.

Menurut Abdullah (2007) terdapat pengaruh positif yang signifikan dari pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap IPM dan kualitas sumber daya manusia, maka diharapkan pemerintah kota Palembang dapat terus meningkatkan realisasi dana bidang pendidikan dan kesehatan dalam APBD setiap tahunnya.

Banyak daerah menyatakan bahwa selama ini sektor pendidikan telah memperoleh alokasi terbesar dari APBD srtiap tahunnya, tetapi hal

tersebut harus diklarifikasi secara jelas dan transparan, bahwa sebagian besar anggaran (sekitar 90 %) hanyalah untuk belanja pegawai/guru (Semeru, 2004). Sehubungan dengan itu, dampak atau pencapaian upaya dari setiap alokasi anggaran harus disediakan dan disampaikan secara terbuka kepada pelaku pendidikan dan masyarakat luas.

Di kabupaten Sleman, pengeluaran pendidikan dan olahraga mencapai 47 % dari nilai APBD. Prestasi yang cukup bagus karena melampaui target nasional sebesar 20%. Namun, hanya 4,2 % yang dibelanjakan untuk kepentingan publik (dinikmati langsung oleh siswa), sedang sisanya kembali untuk kepentingan aparat yang tecermin dari biaya operasional, perjalanan dinas, dan lain-lain. Komposisi anggaran seperti ini hanya memakmurkan aparat dan bukan untuk dinikmati rakyat.

Isu Strategis dan Masalah Mendesak yang masih perlu mendapat perhatian dan penanganan secara serius di kota Palembang pada sektor pendidikan; kualitas Pendidikan masyarakat relatif masih rendah; yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk, masih tingginya angka putus sekolah, belum meratanya akses terhadap pelayanan pendidikan, belum meratanya distribusi tenaga pendidik baik dari segi kualitas maupun kuantitas, serta masih rendahnya mutu pendidikan. (RPJMD Palembang 2008 s.d 20013). Adapun profil pendidikan di Kota Palembang pada tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Profil Pendidikan kota Palembang tahun 2010

URAIAN	Total
Angka Partisipasi Murni (APM)	5622,22
Angka Partisipasi Kasar (APK)	1.036,81
Jumlah Tenaga Kependidikan	19.767
Jumlah Sekolah (SD, SMP, SMA)	1.206
Jumlah Sekolah yang rusak (Berat, Sedang, Ringan)	1.856
Jumlah Siswa per Sekolah (SD, SMP, SMA) dan Terpilah	34.873

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Palembang

Masalah bagi stakeholder pendidikan di kota Palembang tersebut adalah bagaimana agar alokasi harus dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk menuntaskan program Wajib Belajar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas Sembilan Tahun) tepat pada waktunya sekaligus untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota Palembang sebagaimana secara normatif tercantum pada perencanaan daerah baik RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan menjadi kunci agar pendidikan khususnya pendidikan di kota Palembang dapat berjalan dengan baik dan bermutu.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan maka aspek biaya (cost) harus diletakkan dalam formulasi anggaran pendapatan dan

belanja daerah (APBD). Atas dasar tersebut perlu diteliti bagaimana implementasi suatu kebijakan publik yaitu pada kebijakan penganggaran pendidikan dijalankan pada pemerintahan daerah di kotaPalembang. Jika masalah ini tidak diteliti dikhawatirkan pemerintahan daerah tidak mengetahui persoalan-persoalan yang timbul dari kebijakan yang dibuat dan tidak mengetahui kelemahan-kelemahan dan penyebab-penyebabnya. Jika itu yang terjadi dikhawatirkan maka kebijakan tersebut tidak akan berjalan dengan baik dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa dalam jangka panjang, khususnya alokasi belanja pendidikan yang signifikan dan upaya dari setiap alokasi program dan kegiatan anggaran pendidikan dalam rangka memperbaiki kualitas sumberdaya manusia, jelas akan mendorong peningkatan produktifitas, menurunkan angka kemiskinan dan pada akhirnya akan memperbaiki kualitas hidup warga negara. Efektifitas penganggaran akan menghasilkan pendidikan bermutu sebagaimana yang dituntut oleh Perda dan Standar Pendidikan Nasional. Pendidikan yang bermutu pada gilirannya akan dapat memberikan kontribusi pada mutu sumber daya manusia kotaPalembang. Untuk itu diajukan penelitian ini dengan judul "Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Kota Palembang" (Studi Alokasi Anggaran dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di kotaPalembang tahun 2012).

Berdasarkan permasalahan di atas yaitu bagaimana anggaran dapat dirinci dalam pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimanakah kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan sumber dana alokasi anggaran pendidikan di kota Palembang ?
2. Apakah yang menjadi prioritas alokasi anggaran di kota Palembang?
3. Bagaimanakah pemanfaatan anggaran pendidikan di kota Palembang?
4. Apakah dampak dari kebijakan alokasi anggaran terhadap mutu pendidikan di kota Palembang?

## KAJIAN PUSTAKA

### Teori Penganggaran Sektor Publik

Akuntansi manajemen sektor publik harus dapat memberikan informasi yang relevan dan handal melalui *strategic planning*, *strategic cost management*, dan *strategic management accounting* untuk dapat menerapkan *New Public Management*,

melaksanakan *value for money* untuk penentuan biaya dan harga layanan publik, serta pengukuran kinerja pengelolaan dalam kerangka *best value performance* dan *public sector scorecard* (Mardiasmo, 2006).

Peran utama akuntansi manajemen dalam organisasi sektor publik adalah memberikan informasi akuntansi yang relevan dan handal kepada manajer untuk melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian manajemen. Fungsi perencanaan meliputi perencanaan strategik, pemberian informasi biaya, penilaian investasi, dan penganggaran, sedangkan fungsi pengendalian meliputi pengukuran kinerja (Mardiasmo, 2006).

Anggaran merupakan *managerial plan for action* untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi (Rahayu dkk, 2007). Proses panjang dari penentuan tujuan ke pelaksanaan anggaran seringkali melewati tahap yang melelahkan, sehingga perhatian terhadap tahap penilaian dan evaluasi sering diabaikan. Kondisi inilah yang nampaknya secara praktis sering terjadi (Bastian, 2006).

Performance budgeting pada dasarnya adalah sistem penyusunan dan pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil kinerja. Kinerja tersebut harus mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik (Yuwono dkk, 2005). Oleh karena itu, anggaran dianggap sebagai pencerminan program kerja (Bastian, 2006b).

### Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Secara lebih spesifik, fungsi APBD dalam proses pembangunan di daerah adalah sebagai Instrumen kebijakan (*policy tools*), Instrumen kebijakan fiskal (*fiscal tool*), Instrumen perencanaan (*planning tool*), Instrumen pengendalian (*control tool*). (Permendagri 13 tahun 2006). Penyusunan APBD perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 1) Partisipasi masyarakat; 2) Transparansi dan akuntabilitas anggaran; 3) Disiplin anggaran; 4) Keadilan anggaran; 5) Efisiensi dan efektivitas anggaran; 6) Taat azas.

Pada tingkat SKPD, anggaran disusun berdasarkan rencana jangka menengah SKPD yang sering disebut Renstra SKPD. Renstra SKPD dan RKPD menjadi acuan bagi SKPD untuk menyusun rencana kerja (Renja) SKPD. Renstra SKPD disusun dengan cara "duduk bersama" para anggota SKPD

serta mengacu kepada RPJP dan RPJM baik nasional maupun daerah.

Draft rencana kerja (Renja) SKPD, khususnya Renja program pembangunan fisik disusun berdasarkan data akurat berdasarkan hasil survei ke lapangan. Draft Renja SKPD yang akan dibahas pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Tingkat Kabupaten/Kota, dibahas terlebih dahulu pada Forum SKPD. Pada Forum SKPD, setiap SKPD memaparkan Renja SKPD dan mendiskusikan dengan pihak kecamatan, untuk menyelaraskan program/kegiatan yang telah disusun SKPD dengan hasil Musrenbang dari setiap kecamatan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD terdiri dari tiga komponen utama, yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Menurut fungsinya, belanja daerah dibedakan atas: 1) pelayanan umum, 2) ketertiban dan keamanan, 3) ekonomi, 4) lingkungan hidup, 5) perumahan dan fasilitas umum, 6) kesehatan, 7) pariwisata dan budaya, 8) agama, 9) pendidikan, dan 10) perlindungan sosial.

Menurut Pasal 39 PP Nomor 58 Tahun 2005, setiap jenis belanja yang dianggarkan harus memperhatikan keterkaitan pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari program dan kegiatan yang dianggarkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian keluaran dan hasil tersebut.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006, APBD perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk mewujudkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang luas, nyata, dan bertanggungjawab diperlukan manajemen keuangan daerah yang mampu mengontrol kebijakan keuangan daerah secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel (Winarna dan Murni, 2007).

Untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi kepala instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran (Rubin dalam Coryanata, 2007). Paradigma yang menuntut lebih besarnya akuntabilitas dan transparansi dari pengelolaan anggaran, dan dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Di antara perubahan yang harus dilakukan adalah pendekatan dalam penganggaran (Yuwono dkk, 2005). Perhatian utama adalah adanya paradigma baru dalam manajemen anggaran daerah (Halim, 2001).

Suryani (2004) menunjukkan bahwa filosofi budaya Hukum Pahamangu Ridihi Pamerangu sangat baik digunakan untuk pedoman penyusunan anggaran daerah di Sumba Timur; dan Munawar (2006) menunjukkan bahwa karakteristik tujuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku dan sikap aparat daerah.

Wahyuni (2006) menyatakan proses penentuan plafon anggaran juga masih menggunakan *incremental budgeting*, yaitu dengan menaikkan dari plafon anggaran tahun sebelumnya dengan tingkat persentase tertentu.

Menurut Abdullah (2007) terdapat pengaruh positif dari pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan terhadap IPM, diharapkan pemerintah propinsi Sumatera Selatan dapat terus meningkatkan realisasi dana sosial dalam APBD setiap tahun. Menurut Ghofur dan Badoh (2008) kenaikan alokasi belanja sosial pendidikan dan kesehatan masih belum signifikan dan berdampak efektif dalam pemenuhan hak pendidikan dan kesehatan warga negara.

## METODE PENELITIAN

Landasan filosofis dari kerangka pemikiran ini adalah bahwa secara teoretik, upaya-upaya pendidikan memerlukan dukungan kebijakan administrasi pendidikan, termasuk kebijakan penganggaran. Secara aturan perundang-undangan pendidikan yang bermutu merupakan bagian integral pendidikan yang diatur oleh Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional dan dalam konteks kota Palembang diatur dalam Peraturan Daerah. Adapun mutu dari pendidikan nilai tersebut mengacu pada rumusan di dalam Perda itu sendiri dan tentunya dikaitkan dengan Standar Pendidikan Nasional.

Masalah pelaksanaan otonomi penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan realitas sosial yang bersifat kontekstual. Karena itu tujuan utama penelitian ini bukanlah untuk menguji suatu hipotesis namun ditujukan untuk mendeskripsikan objek yang diteliti melalui proses pengeksploasian fakta dan data lapangan sebagaimana adanya.

Variable yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan kemampuan keuangan daerah, prioritas anggaran, pemanfaatan anggaran dan dampak dari implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di kota Palembang. Penelitian ini tergolong dalam penelitian yang menggunakan Metode Naturalistik dengan Pendekatan Kualitatif.

Penelitian ini bukan sekedar mendeskripsikan realitas sosial, tetapi perlu analisis-analisis yang bersifat prediktif, maka metode yang paling dianggap sesuai dengan konteks masalah yang diteliti digunakan metode penelitian analisis kebijakan atau metoda *post policy analysis* (MacMillan & Schumacher, 2001). Sedangkan analisis kebijakan yang digunakan adalah analisis keefektifan biaya. Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan cara wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang relevan dalam memberikan informasi terkait dengan masalah yang diteliti.

Adapun unit-unit analisis ialah :

- a. Pemerintah kota Palembang, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Palembang.
- c. Kepala Sekolah dan Guru SD dan SMP di di kota Palembang.

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram (Umar, 2003:69).

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa data dokumen RPJMD dan Dokumen RKPD, Dokumen Penjabaran APBD atau RKA SKPD/DPA SKPD, serta data lain yang berupa literatur, tulisan ilmiah, artikel, maupun dokumen dan referensi sumber lain yang menunjang penelitian ini. Data-data di atas diperoleh melalui instansi dan atau lembaga yang relevan dan punya keterkaitan dengan tema penelitian ini.

Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis maupun teori tertentu, melainkan berupaya untuk menelusuri pemahaman baru mengenai fenomena yang dikaji. Peneliti memperlakukan diri sebagai instrument utama (*human instrument*), yang bergerak dari hal-hal spesifik, dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dan memadukan data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kesimpulan-kesimpulan dapat ditemukan.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles dan Huberman, 1992).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sektor pendidikan merupakan satu-satunya sektor yang alokasi anggarannya diatur dalam konstitusi, yaitu 20% dari anggaran pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan tingginya prioritas sektor ini dalam mencapai tujuan bernegara. Pendidikan yang baik dipercaya dapat meningkatkan kualitas keluaran pembangunan, baik dari sisi ekonomi seperti Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) maupun sosial seperti yang diukur melalui beberapa indikator Millenium Development Goals (MDGs). Di tingkat mikro, sektor pendidikan dipercaya dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan kualitas hidupnya, sehingga bisa keluar dari kemiskinan.

Variable yang menjadi fokus penelitian ini adalah berkenaan dengan kemampuan keuangan daerah, prioritas anggaran, pemanfaatan anggaran dan dampak dari implementasi kebijakan alokasi anggaran pendidikan pada jenjang pendidikan dasar di kota Palembang.

### Kemampuan Keuangan Daerah

Kondisi keuangan daerah diukur dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sering dijadikan parameter otonomi daerah. PAD kota Palembang pada tahun 2012 mencapai Rp 520.831.735.524 dan jika dilihat dari struktur APBD memberikan kontribusi terhadap total pendapatan daerah sebesar 23,2 %. PAD berasal dari jenis pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Daerah kota Palembang pada tahun 2012 yang sudah diaudit BPK RI adalah sebesar Rp 2.244.496.916.669 dan dana bagi belanja pendidikan adalah sebesar Rp 1,162,822,162,400, kurang lebih 51,8 % dari total APBD nya, alokasi belanja Dinas Pendidikan di kota Palembang sudah lebih dari 20 persen, seperti yang diamanahkan oleh Undang – undang sisdiknas No 20 tahun 2003 pada pasal 49 ayat 1 yang berbunyi “*Dana pendidikan selain gaji dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.*” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kota Palembang sudah menjalankan otonomi daerahnya di bidang pendidikan dengan baik.

Pemerintah kota Palembang memperoleh alokasi anggaran pembangunan yang berasal dari APBN yang dikelola pemanfaatannya oleh Dinas Pendidikan. Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran program dan kegiatan pendidikan yang

dibiayai melalui APBN tahun 2012 adalah sebesar 46,344 %, sedangkan yang dibiayai melalui APBD sebesar 55,656 %, dengan bantuan juga dari APBD propinsi Sumatera Selatan. Kendatipun demikian alokasi anggaran pendidikan di kota Palembang sebenarnya masih banyak ditopang oleh dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) yang mencapai Rp 230,988 miliar lebih.

### **Prioritas Anggaran Pendidikan**

Visi pembangunan Kota Palembang sampai dengan tahun 2013, adalah “ Palembang Kota Internasional, Sejahtera dan Berbudaya 2013”. Prioritas alokasi anggaran pendidikan dasar di kota Palembang yaitu dalam Misimeningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, bermoral, berbudaya serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Untuk mewujudkan misi tersebut telah ditetapkan tujuannya yaitu terciptanya tenaga kerja yang berdaya saing internasional. Dalam tahun 2012 telah dilaksanakan upaya pencapaian dari misi tersebut dengan sasaran pertama yaitu Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV.

Adapun Visi dinas pendidikan pemuda dan olahraga kota Palembang yaitu Terwujudnya Palembang kota pendidikan cerdas dan bermartabat, dengan prioritas misi yaitu meningkatkan pemerataan pelayanan pendidikan menuju tuntas wajib belajar pendidikan menengah 12 tahun, meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan baik formal maupun non formal.

Kebijakan alokasi anggaran pendidikan dasar pada dinas pendidikan pemuda dan olahraga di kota Palembang diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang efektif, mewujudkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penunjang pendidikan yang memadai. Sebagai dasar dari tujuan ditentukan sasaran sebagai berikut ; meningkatnya angka partisipasi, meningkatnya rata-rata nilai ujian akhir sekolah, meningkatnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendidik, meningkatnya angka melanjutkan sekolah, meningkatnya kuantitas sarana prasarana penunjang KBM, meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk.

### **Pemanfaatan Anggaran Pendidikan**

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja

langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada belanja SKPD berkenaan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD pada masing-masing SKPD.

Sebanyak 19,34 % anggaran pendidikan yang berasal dari APBD kota Palembang dialokasikan untuk Belanja Langsung, sedangkan 75,66% dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung seluruhnya berjumlah Rp 224,946,028,581, Sedangkan Belanja Tidak Langsung seluruhnya berjumlah Rp 879,792,347,023 digunakan untuk Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pendidikan dan Gaji /Tunjangan Guru Pendidikan Luar Biasa sebesar Rp 853,994 miliar lebih dan Tambahan penghasilan PNS sebesar 25,797 miliar lebih. Besarnya alokasi belanja tidak langsung ini menunjukkan kurang efisien dan lebih proporsinya terhadap belanja langsung, yang sebaiknya Belanja langsung yang seimbang atau lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung yang diperuntukkan pemanfaatannya bagi masyarakat.

Belanja Langsung teralokasi ke dalam tiga komponen belanja; belanja pegawai, barang dan jasa serta modal. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan atau pemkaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembanguna aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja Langsung adalah untuk membiayai program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp 43,591 miliar lebih, belanja barang dan jasa sebesar Rp. 46,987 miliar lebih, dan belanja modal sebesar Rp. 134,367 miliar lebih. Pada belanja langsung pada belanja pegawai terdapat honorarium pengelolaan BOS sebesar Rp 36,190 miliar lebih sebesar 16 % dari total belanja langsung. Besarnya

alokasi ini menunjukkan kurang efisien dan lebih proporsinya terhadap belanja langsung, yang sebaiknya Bantuan Operasional Sekolah yang diperuntukkan pemanfaatannya bagi para siswa.

Komponen anggaran yang terbesar diberikan untuk belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur sebesar Rp 94,668 miliar lebih, dalam kegiatan-kegiatan Pembangunan gedung kantor, Pengadaan kendaraan dinas/perasional, pengadaan perlengkapan gedung kantor, pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor-kendaraan dinas/operasional, rehab sedang/berat gedung kantor. Besarnya anggaran tersebut menunjukkan masih kurangnya komitmen Pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun sekaligus meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan mutu para Guru

#### **Dampak Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan**

Dampak Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan tahun 2012 padaprioritas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar di kota Palembang dengan sasaran pertama yaitu Meningkatkan mutu pendidikan masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK ) tingkat SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK ) tingkat SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI, Angka partisipasi murni sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B, Angka Putus sekolah SD/MI, Angka Putus sekolah SLTP/MTs, Angka kelulusan SD/MI, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Rasio Siswa dengan Buku, Tingkat Pelayanan Manajemen Pendidikan, Persentase ruang kelas Baik, Persentase Fasilitas Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah.

Sasaran kedua yaitu Meningkatkan jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan indikator kinerja sasaran, yaitu meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid. Capaian sasaran meningkatnya mutu pendidikan masyarakat sebesar 114.63. Capaian indikator kinerja sasaran tersebut dilaksanakan dengan kategori baik sekali (85-100), walaupun belum secara keseluruhan indikator kinerja sasaran terealisasi  $\geq 100\%$ . Hasil pengukuran evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis menunjukkan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja masih belum mencapai target yaitu Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs. Capaian masing-masing indikator kinerja

sasaran tersebut dapat dijelaskan adalah sebagai berikut :

#### **Angka Partisipasi Kasar (APK ) tingkat SD/MI**

Angka partisipasi kasar merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya dalam pendidikan di jenjang SD/MI yang ada di Kota Palembang. Pada tahun 2012 terjadi peningkatan sebesar 0.92% dari tahun 2011 serta melampaui target tahun 2012 yang ditetapkan sebesar 107.78% dengan realisasi sebesar 108,47 %. Nilai ini menunjukkan bahwa dari jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun sebanyak 180.128 jiwa, pada tahun 2012 yang mejalani pendidikan SD/MI/Paket A tahun 2012 sebanyak 195.384 jiwa, melampaui target sebanyak 15.256 jiwa yang merupakan penduduk yang berusia di bawah 7 tahun atau telah mendekati 7 tahun dengan didukung oleh ruang kelas yang cukup.

Keberhasilan pencapaian target ini tidak terlepas dari usaha dan kerja keras jajaran Pemerintah Kota Palembang melalui Disdikpora Kota Palembang, serta adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Propinsi berupa Program Sekolah Gratis (PSG) dan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program Sekolah Gratis dan BOS untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs/SMP-T. Hal ini sangat mendukung terlaksananya pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Palembang dapat terlaksana dengan baik.

#### **Angka Partisipasi Kasar (APK ) tingkat SMP/MTs**

Sebagaimana di jenjang SD/MI Angka Partisipasi Kasar merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang dan sekitarnya dalam pendidikan di jenjang SMP/MTs/Paket B yang ada di Kota Palembang. Realisasi indikator kinerja ini ditahun 2012 sebesar 106,59% dari target yang ditetapkan sebesar 105.14%, Hal ini menunjukan jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun sebanyak 87.250 jiwa telah menjadi siswa SMP/MTs/Paket B tahun 2012 dan bahkan melampaui target, dengan siswa sebanyak 92.997 orang yang didapat dari jumlah penduduk di bawah usia 13 tahun telah pendidikan SD/MI dan melanjutkan /MTs/PaketB.

Keberhasilan pencapaian target ini juga tidak terlepas dari Pemerintah Kota Palembang melalui dinas pendidikan namun juga adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program BOS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Program Sekolah Gratis

(PSG), Bantuan Siswa Miskin (BSM). Hal ini sangat mendukung terlaksananya pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun di Kota Palembang meskipun kisarannya masih diharapkan dapat bertambah sesuai kebutuhan riil sekolah.

#### **Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI**

Angka partisipasi murni merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang usia 7-12 tahun yang berada di jenjang SD/MI yang ada di Kota Palembang. Persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2012 sebesar 100,60%, target yang ditetapkan sebesar 99,45% terealisasi sebesar 100,05%, Hal ini berarti jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun yaitu 180.128 orang merupakan siswa Jumlah siswa SD/MI/PK.A. Keberhasilan pencapaian target karena kerja keras Pemerintah Kota Palembang dan tidak terlepas dari adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program BOS untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs/SMPT, dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Program Sekolah Gratis (PSG).

#### **Angka partisipasi murni sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B**

Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B merupakan angka keterlibatan masyarakat Kota Palembang usia 13-15 tahun yang berada di jenjang SMP/MTs/Paket B yang ada di Kota Palembang. Persentase capaian indikator kinerja pada tahun 2012 sebesar 102,19%, target yang ditetapkan sebesar 99,38% terealisasi sebesar 101,55%, Hal ini berarti penduduk usia 13 - 15 tahun yaitu 87.250 orang semuanya telah menjadi siswa tingkat SMP/MTs/Paket B. Keberhasilan pencapaian target ini merupakan kerja keras dari Pemerintah Kota Palembang dan adanya perhatian dan bantuan dari Pemerintah Pusat yang dikenal dengan Program BOS untuk jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B, perhatian dan bantuan pemerintah Provinsi seperti Program Sekolah Gratis (PSG), Bantuan Siswa Miskin (BSM).

#### **Angka Putus sekolah SD/MI**

Program Angka Putus Sekolah adalah program yang bertujuan menurunkan angka putus sekolah di Kota Palembang dengan upaya mengantisipasi jangan sampai siswa-siswa yang bermasalah terutama masalah biaya tidak dapat bersekolah karena terbentur biaya. Target ditetapkan pada tahun 2012 sebesar 0,75 % terealisasi sebesar 0,00 % dengan persentase

pencapaian sebesar 200%. Hal ini menunjukkan dari jumlah penduduk usia 7 12 pada tahun ajaran sebelumnya 169.987 orang semuanya telah menjadi siswa/sekolah dan di tahun 2012 tidak ada siswa yang putus sekolah di jenjang SD/MI. Pencapaian ini tidak terlepas dari program bantuan BOS Pemerintah Pusat yang membebaskan segala pungutan kepada semua siswa bagi semua sekolah SD/MI/Paket A Negeri dan bagi sekolah Swasta meringankan biaya pada semua wali murid dan membebaskan biaya bagi siswa miskin. Dengan program ini diharapkan semua siswa usia sekolah dapat bersekolah dengan tidak adanya pungutan dari sekolah. Selain itu Pemerintah Kota Palembang memiliki program kelas khusus yakni merekrut siswa-siswa yang putus sekolah untuk diajari di tempat tertentu dengan fasilitas yang telah disediakan sehingga anak-anak tersebut dapat menyelesaikan pendidikan dasarnya. Ada juga program Kejar Paket yang dilaksanakan oleh Bidang Pendidikan Non Formal.

#### **Angka Putus sekolah SLTP/MTs**

Seperti halnya Program Angka Putus Sekolah SD program ini bertujuan menurunkan angka putus sekolah SMP/MTs/Paket B di Kota Palembang dengan upaya mengantisipasi jangan sampai siswa-siswa yang bermasalah terutama masalah biaya tidak dapat bersekolah karena terbentur biaya. Realisasi capaian pada indikator ini adalah sebesar 0,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada siswa tingkat SMP/MTs yang putus sekolah. Keberhasilan ini merupakan kerja keras Pemerintah Kota Palembang dan adanya bantuan BOS yang membebaskan segala pungutan kepada semua siswa bagi semua sekolah SD/MI/Paket A Negeri dan bagi sekolah Swasta meringankan biaya pada semua wali murid dan membebaskan biaya bagi siswa miskin. Dengan program ini diharapkan semua siswa usia sekolah dapat bersekolah dengan tidak adanya pungutan dari sekolah.

#### **Angka kelulusan SD/MI**

Angka kelulusan adalah perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada tahun 2012 persentase Capaian kelulusan SD/MI di Kota Palembang tahun 2012 sebesar 100,79% dimana target yang ditetapkan sebesar 99,22 % dan terealisasi sebesar 99,61 %. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah lulusan pada jenjang SD/MI/paket A yakni sejumlah 24.747 orang dibagi dengan jumlah siswa

tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI/paket A pada tahun sebelumnya yakni sebanyak 24,843 orang dan dikalikan dengan 100%. Keberhasilan pencapaian program ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan wajib belajar 12 tahun yang digulirkan pemerintah, kemudian adanya Program BOS, PSG, yang sangat membantu masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendidikan di Kota Palembang

#### **Angka kelulusan SLTP/MTs**

Angka kelulusan adalah perbandingan antara siswa yang mengikuti ujian dengan siswa yang berhasil lulus. Pada tahun 2012 persentase kelulusan SMP/MTs/Paket B di Kota Palembang sebesar 100,05 % dimana target yang ditetapkan sebesar 99,90% dengan realisasi sebesar 99,95%. Angka ini diperoleh dari pembagian antara jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs/Paket B yakni sejumlah 24.091 orang dibagi dengan jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun sebelumnya yakni 24,074 dan dikalikan dengan 100%. Keberhasilan pencapaian program ini tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat akan wajib belajar 12 tahun yang digulirkan pemerintah, kemudian adanya Program BOS, PSG, yang sangat membantu masyarakat untuk mengikuti kegiatan pendidikan di Kota Palembang.

#### **Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.**

Angka melanjutkan (AM) SMP/MTs adalah persentase perbandingan antara siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTs sebanyak 24,051 dibagi dengan jumlah lulusan pada jenjang SMP/MI/Paket B pada tahun ajaran sebelumnya sebanyak 24.177 orang. Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs ini pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang tidak dapat mencapai target yang ditetapkan yakni sebesar 100,00% sedangkan pencapaiannya hanya sebesar 99,48%. Ketidak tercapaian ini sangat bersifat fluktuatif karena pada tahun sebelumnya dapat mencapai target 100,00% hal ini dapat disebabkan akibat kondisi ekonomi orang tua siswa. Akan tetapi karena ketidak tercapaian target ini hanya 0,52 % maka hal ini dapat dikategorikan tercapai.

#### **Rasio Siswa dengan Buku**

Rasio Siswa dengan Buku adalah perbandingan buku pelajaran yang ada yakni 381,656 exl dibagi dengan jumlah siswa yaitu 380,857 orang dan dikalikan dengan jumlah mata

pelajaran yaitu 11 mata pelajaran. Pada tahun 2012 ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dapat mencapai kinerja sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 11,00 dapat dicapai sebesar 11,02. Keberhasilan program ini tidak terlepas dari program BOS Buku yang dilaksanakan Pemerintah Pusat melalui dana APBN mulai tahun 2006.

#### **Tingkat Pelayanan Manajemen Pendidikan**

Kondisi yang menggambarkan tingkat pembinaan melalui sosialisasi, pelatihan, workshop, kepada lembaga kependidikan yang ada. Lembaga kependidikan meliputi seluruh sekolah pada semua tingkatan, seluruh komite sekolah, dan seluruh dewan sekolah yakni 1.228 lembaga yang dibina dibagi dengan jumlah seluruh lembaga kependidikan yaitu 1.228 lembaga dan dikalikan 100. Pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang dapat merealisasikan target yang ditetapkan sebesar 100,00%. Hal ini dapat terlaksana dengan baik dikarenakan indikator ini sudah merupakan tugas pokok yang secara rutin dilaksanakan setiap tahun.

#### **Persentase Ruang Kelas Baik**

Persentase Ruang Kelas adalah persentase komposisi ruang kelas yang aman untuk kegiatan belajar mengajar dan tidak memerlukan perbaikan yakni sebanyak 8.753 ruang dibagi dengan jumlah ruang kelas seluruhnya yaitu sebanyak 9.561 ruang. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang pada tahun 2012 ini dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar 90,72% dengan realisasi sebesar 91,55%. Dengan demikian pencapaian kinerja untuk indikator ini sebesar 101,15%. Keberhasilan ini merupakan hasil dari program kegiatan Rehabilitasi Fisik Gedung dari Pemerintah Kota Palembang yang ditopang program DAK dari APBN dan Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.

#### **Persentase Fasilitas Sekolah**

Persentase Fasilitas Sekolah adalah penggambaran tingkat ketersediaan fasilitas sekolah pada jenjang tertentu sebanyak 1.131 fasilitas dibagi dengan jumlah sekolah pada jenjang tertentu yaitu sebanyak 1.228 sekolah dikalikan dengan 100. Fasilitas sekolah dalam hal ini meliputi perpustakaan, Labor, ruang serba guna, ruang keterampilan, ruang komputer, dan ruang bengkel. Pada tahun 2012 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang menargetkan 90,69 % sekolah memiliki

fasilitas yang memadai yang kemudian dapat tercapai sebesar 92,10%. Artinya pencapaian indikator ini sebesar 101,80%. Hal ini merupakan keberhasilan dari program Pemerintah Kota Palembang yang dibantu Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Pusat dengan dana APBN.

#### Angka rata-rata lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah dibagi lama sekolah disetiap jenjangnya. Untuk indikator Angka Rata-Rata Lama Sekolah ini Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang pada tahun 2012 menargetkan sebesar 15,43 tahun berhasil dicapai sebesar 15,66 tahun. Hal ini menunjukkan semakin mengertinya masyarakat Kota Palembang untuk menyekolahkan anak-anaknya di jenjang pendidikan formal di Kota Palembang.

#### Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Capaian sasaran meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 108,78%, Target yang ditetapkan pada tahun terealisasi sebesar 2012 sebesar 82,20% dengan persentase pencapaian sebesar 115,55%. Angka ini diperoleh dari perbandingan jumlah guru yang bersertifikasi S.1/D.IV sebanyak 20.296 orang dengan jumlah guru sebanyak 21.368 orang (94,98%), indikator ini setiap tahunnya meningkat dimana pada tahun 2009 sebesar 70,21%, tahun 2010 sebesar 88,92% tahun 2011 sebesar 89,17%.

Keberhasilan pencapaian program ini tidak terlepas dari adanya program bantuan kualifikasi S.1 / D.IV yang diberikan pemerintah melalui dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota Palembang. Selain itu ada juga program kegiatan sertifikasi yang mengharuskan guru memiliki standar pendidikan minimal S.1. Program kegiatan sertifikasi guru ini memberikan motivasi tersendiri bagi guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S.1. Oleh sebab itu diharapkan program kegiatan bantuan kualifikasi S.1/D.IV ini hendaknya dapat terus diberikan sampai semua guru di Palembang memiliki sertifikasi S.1/D.IV.

#### Rasio Guru Terhadap Murid.

Rasio Guru Terhadap Murid/Siswa adalah perbandingan jumlah guru sebanyak 21.368 orang dibagi dengan jumlah siswa pada setiap jenjang pendidikan yaitu sebanyak 41,952 orang. Pada

tahun 2012 Pemerintah Kota Palembang menargetkan Rasio Guru terhadap Murid ini sebesar 19,97 (artinya rata-rata setiap guru mengajar siswa sebanyak 19,97 orang siswa) sepanjang tahun 2012 rasio guru terhadap murid sebesar 20,37 (artinya rata-rata setiap guru mengajar siswa sebanyak 20,37 orang siswa) dengan persentase pencapaian sebesar 102%. pada tahun 2012 meningkat pesat dikarenakan pengangkatan guru di Kota Palembang baik pengangkatan guru PNS maupun guru non PNS, dalam hal ini pemerintah Kota Palembang pada tahun 2012 tidak melakukan pengangkatan guru PNS akan tetapi tetap melakukan penambahan guru melalui pengangkatan guru honor atau guru tidak tetap.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

1. Kemampuan Keuangan Daerah dengan PAD sebesar 23,2 % dari total pendapatan daerah. Dana bagi belanja pendidikan adalah sebesar 51,8 % dari total APBD nya, alokasi belanja Dinas Pendidikan di kota Palembang sudah lebih dari 20 persen, kota Palembang sudah menjalankan otonomi daerahnya di bidang pendidikan dengan baik.
2. Pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebanyak 19,34 % anggaran pendidikan yang berasal dari APBD kota Palembang dialokasikan untuk Belanja Langsung, sedangkan 75,66% dialokasikan untuk Belanja Tidak Langsung. Alokasi terbesar belanja tidak langsung yaitu Gaji dan Tunjangan PNS Dinas Pendidikan dan Gaji /Tunjangan Guru Pendidikan Luar Biasa dan Tambahan penghasilan PNS. Besarnya alokasi belanja tidak langsung ini menunjukkan kurang efisien dan lebih proporsinya terhadap belanja langsung, yang sebaiknya Belanja langsung yang seimbang atau lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung yang diperuntukkan pemanfaatannya bagi masyarakat.
3. Alokasi terbesar pada belanja langsung yang kurang efektif dan efisien yaitu pada belanja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dan honorarium pengelolaan BOS, yang sebaiknya belanja langsung diperuntukkan pemanfaatannya bagi masyarakat .
4. Dampak Implementasi Kebijakan Alokasi Anggaran Pendidikan tahun 2012 pada prioritas Alokasi Anggaran Pendidikan Dasar di kota Palembang dengan sasaran pertama yaitu Meningkatnya mutu pendidikan masyarakat,

dengan indikator kinerja sasaran, yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SD/MI, Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/MTs, Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI, Angka partisipasi murni sekolah tingkat SMP/MTs/Paket B, Angka Putus sekolah SD/MI, Angka Putus sekolah SLTP/MTs, Angka kelulusan SD/MI, Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, Rasio Siswa dengan Buku, Tingkat Pelayanan Manajemen Pendidikan, Persentase ruang kelas Baik, Persentase Fasilitas Sekolah, Angka rata-rata lama Sekolah. Sasaran kedua yaitu Meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV dengan indikator kinerja sasaran, yaitu meningkatnya jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, Rasio Guru Terhadap Murid. Hasil pengukuran evaluasi dan analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis menunjukkan 15 (lima belas) indikator kinerja sasaran telah mencapai/melampaui target yang ditetapkan dan 1 (satu) indikator kinerja masih belum mencapai target yaitu Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs.

#### Saran

1. Proses pengalokasian anggaran perlu lebih meningkatkan dijalankannya prinsip-prinsip good governance yaitu partisipasi masyarakat, peduli pada stakeholders, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, transparansi, dan visi strategis.
2. Implementasi kebijakan yang berkaitan dengan anggaran pendidikan hendaknya mengarah pada sejauh mana sumberdaya yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai hasil tertentu yang telah ditetapkan : yaitu berkaitan dengan akuntabilitas praktek; menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik; mempertimbangkan rasa keadilan; menunjukkan pemihakan pada kelompok berpendapatan rendah dan mempersempit kesenjangan. Pemanfaatan Anggaran Pendidikan sebaiknya dialokasikan terbesar untuk Belanja Langsung, Besarnya alokasi belanja tidak langsung ini menunjukkan kurang efisien dan lebih proporsinya terhadap belanja langsung, yang sebaiknya Belanja langsung yang seimbang atau lebih besar dibandingkan belanja tidak langsung yang diperuntukkan pemanfaatannya bagi masyarakat. Alokasi terbesar pada belanja langsung yang kurang efektif dan efisien yaitu pada belanja Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur dan honorarium pengelolaan BOS, yang sebaiknya belanja langsung diperuntukkan pemanfaatannya bagi masyarakat.

3. Alokasi anggaran lebih besar perlu diberikan untuk program pendidikan dasar dengan alokasi anggaran diprioritaskan pada : (1) Peningkatan infrastruktur pendidikan; (2) Peningkatan akses pendidikan; (3) Peningkatan mutu pendidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Djakfar. 2007. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Public Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Perkapita terhadap IPM di Sumatera Selatan*. Tesis. Pascasarjana Universitas Sriwijaya Palembang. (Tidak dipublikasi).
- Bastian, I., 2006a. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Erlangga. Jakarta.  
*Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Coryanata, Isma. 2007. *Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Dan Transparansi Kebijakan Public Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang APBD*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar 26 -28 juli 2007.
- Ghofur dan Badoh (2008). *Menabur Anggaran Menunai Masa Depan*  
[www.gapri.org/tfiles/file/data%20kemiskinan/MENABUR%20ANGGARAN.doc](http://www.gapri.org/tfiles/file/data%20kemiskinan/MENABUR%20ANGGARAN.doc)
- Halim. A., 2001. *Manajemen Keuangan Daerah APBD*. Edisi Pertama. Salemba Empat. Jakarta.  
2004. *Akuntansi Sektor Publik.: Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Salemba Empat. Jakarta
- Moleong, L.J.2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. PT Remaja Rosdakarya. Bandung
- Mardiasmo. 2002, *Otonomi Daerah Sebagai Upaya Memperkokoh Basis Perekonomian Daerah*. Artikel - Th. I - No. 4 – Juni.  
*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi Yogyakarta. 2004.

- Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta. 2006, *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*, JURNAL AKUNTANSI PEMERINTAH Vol. 2, No. 1, Hal 1 – 17.
- Munawar. 2006. *Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran terhadap Perilaku, Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang*. Tesis. Universitas Brawijaya. Malang.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40
- Rahayu, Sri. dkk. 2007. *Studi Fenomenologis terhadap Proses Penyusunan Anggaran Daerah Bukti Empiris Dari SKPD di Propinsi Jambi*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar 26 -28 Juli 2007.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Suryani, S. 2004. *Penyusunan Anggaran Partisipatif Berbasis Kinerja dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Nilai-Nilai Budaya Sumba Timur*. Tesis. Universitas Brawijaya.
- Semeru, 2002, Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah ([www.Semeru.or.id](http://www.Semeru.or.id))
- Winarna, Jaka. Sri Murni 2007. *Pengaruh Personal Background, Political Background dan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran terhadap Peran DPRD dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Simposium Nasional Akuntansi 10. Makassar 26 -28 juli 2007.
- Yuwono, S., I.T. Agus, dan Hariyandi. 2005. *Penganggaran Sektor Publik, Pedoman Praktis, Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBD (Berbasis Kinerja)*. Bayumedia Publising, Mala